

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas belum maksimal. Penyebabnya karena (1) pada tahap penyaluran mengalami keterlambatan, karena Desa Randugunting dalam melengkapi syarat pencairan dana desa tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan. (2) melihat penggunaan dana desa yang lebih dari 90% untuk pembangunan fisik mengakibatkan tujuan kebijakan sulit dicapai (3) tahap pelaporan juga belum dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, laporan penggunaan dana desa di Desa Randugunting selalu mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan.

5.1.2. Hambatan dalam implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang, studi kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas.

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Randugunting menemui hambatan (1) kepentingan kelompok sasaran terutama pada bidang

pemberdayaan masyarakat belum banyak termuat sehingga kebijakan ini belum menimbulkan perubahan perilaku yang berarti di masyarakat Desa Randugunting, (2) jangkauan perubahan dari adanya kebijakan ini belum sepenuhnya ditangkap oleh pelaksana kebijakan khususnya pelaksana di tingkat desa, (3) kedudukan pengambil kebijakan yang berada di tingkat pusat dan melibatkan tiga kementerian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih aturan dan pelaksanaan fungsi sehingga menimbulkan kebingungan, (4) ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini pelaksana kebijakan terdapat kekurangan kemampuan manajerial pada Pemerintah Desa Randugunting, selain itu kompetensi dari pendamping desa yang kurang juga menjadi masalahnya, (5) kekuasaan, minat dan strategi aktor pada pelaksana tingkat desa tidak maksimal, belum sepenuh hati dalam melaksanakan kebijakan, (6) karakteristik rejim juga mempengaruhi jalannya kebijakan, yaitu penetapan pendamping desa yang dipengaruhi oleh partai pemenang pemilu sehingga mengesampingkan kompetensinya, dan (7) penyerapan aspirasi perencanaan pembangunan juga menjadi penyebab implementasi kebijakan belum maksimal, kurangnya keterkaitan dengan RPJMDes dan kurangnya pemerintah mengakomodir kebutuhan masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Randugunting harus lebih memahami tujuan dari adanya dana desa dan memperhatikan peraturan pelaksanaan kebijakan, program yang dilakukan dari adanya kebijakan dana desa ditujukan untuk kemajuan masyarakat dan desa. Peningkatan kesadaran dan minat akan adanya dana desa juga harus dilakukan demi memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.
2. Pemerintah Desa Randugunting harus lebih mengakomodir aspirasi masyarakat dalam bidang apapun yang merupakan kebutuhan masyarakat, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja apalagi dengan alasan lebih mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan banyak resiko.
3. Perlu dilakukan pendampingan, pembinaan, pelatihan dan fasilitasi yang lebih intens terutama pada pelaksana kebijakan di tingkat desa dan untuk pendamping desa yang kurang berkompeten.
4. Harus dilakukan evaluasi terhadap proses seleksi pendamping desa yang beorientasi pada kompetensi.